

AKTIVISME TRANSNASIONAL BARU DALAM GERAKAN *MILK TEA ALLIANCE*: SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DI HONG KONG, THAILAND, DAN TAIWAN

Rayhan Fasya Firdausi

S1 Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

rayhanfasyafirdausi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan membahas gerakan Milk Tea Alliance sebagai gerakan aktivisme transnasional baru. Globalisasi yang terjadi di era kontemporer menghasilkan konektivitas yang dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok massa untuk menggerakkan orang lain melalui teknologi. Riset ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana MTA bisa mempengaruhi gerakan massa untuk mendukung ide demokrasi di Hong Kong, Thailand, dan Taiwan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus dengan melihat perkembangan gerakan dengan menggunakan kerangka konseptual aktivisme transnasional baru milik Sidney Tarrow. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada tagar yang dipertukarkan yang berhasil mendorong massa untuk melakukan gerakan baik secara online ataupun offline untuk mengungus ide demokrasi dengan didukung penggunaan teknologi.

Kata-kata kunci: Gerakan; Kolektif; Massa; MTA.

Abstract

This study will discuss the Milk Tea Alliance movement as a new transnational activism movement. Globalization in the contemporary era produces connectivity that many mass groups use to move others through technology. This research aims to explain how MTA can influence mass movements to support the idea of democracy in Hong Kong, Thailand, and Taiwan. The research method that will be used is a case study by looking at the development of the movement using the conceptual framework of Sidney Tarrow's new transnational activism. The results of this study found that there were exchanged hashtags that succeeded in encouraging the masses to carry out movements both online and offline to carry the idea of democracy supported by technology.

Keywords: Movement; Collective; Mass; MTA

PENDAHULUAN

Saat ini, gerakan sosial dalam hubungan internasional telah menjadi fokus baru. Globalisasi merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial berskala besar. Kemajuan teknologi informasi membuat gerakan sosial semakin transnasional, sehingga muncul gerakan sosial transnasional. Proses globalisasi melibatkan lebih dari sekadar aspek ekonomi dan elit politik. Interaksi lintas batas antar aktor masyarakat sipil (Donatella Della Porta, 2005; Nizmi, 2016; Tarrow, 2005) merupakan salah satu fenomena dalam politik kontemporer yang mendapat perhatian tinggi dari media dan akademisi. Di sinilah aktivitas transnasional meningkat ketika LSM dan gerakan sosial tidak hanya fokus pada wilayah domestik atau lokal, tetapi juga bertindak lintas batas negara. Aktivisme politik transnasional menantang pemahaman tradisional tentang masyarakat sipil dan gerakan sosial serta hubungan internasional.

Secara historis, aktivisme transnasional tidaklah sebuah fenomena baru. Setidaknya sejak abad kesembilan belas aktor-aktor masyarakat sipil konsen dalam isu yang melibatkan aktivitas lintas negara. (Nizmi, 2016; Piper & Uhlin, 2004a; Tarrow, 2005) Gerakan sosial saat ini semakin tidak memandang batas-batas negara karena adanya globalisasi dan kemajuan teknologi. Ide-ide sebuah gerakan di satu negara dapat ditransfer dengan cepat ke negara lain tanpa adanya pertemuan secara langsung. Salah satu gerakan tersebut adalah *Milk Tea Alliance*, sebuah gerakan yang berkembang di Asia untuk mendukung ide-ide demokrasi. Gerakan ini masif tersebar secara *online* melalui platform Twitter.

Aktivisme transnasional baru memandang bahwa gelombang globalisasi yang terjadi di era kontemporer mempengaruhi perkembangan aktivisme transnasional. Gelombang ini menyebabkan adanya perubahan struktur politik internasional yang menyebabkan meluasnya permasalahan-permasalahan domestik ke ranah internasional sehingga memobilisasi massa untuk melakukan aksi kolektif secara internasional pula. (Donatella Della Porta, 2005; Piper & Uhlin, 2004b; Tarrow, 2005) Aktivisme transnasional baru juga

melibatkan peran kemajuan teknologi informasi. Fenomena ini dapat kita lihat pada gerakan MTA yang tersebar di Twitter. Beberapa cuitan populer yang menggunakan tagar MTA akhirnya melatarbelakangi mobilisasi massa untuk mendukung suatu isu tertentu di negara-negara tertentu, yang jelas isu tersebut pasti berkaitan dengan isu demokrasi. Dapat dilihat bahwa berkembangnya MTA yang didukung oleh netizen Twitter dari berbagai negara disebabkan oleh adanya globalisasi yang akhirnya bisa memperluas pemahaman masyarakat global tentang isu demokrasi yang sedang terjadi di Hong Kong, Thailand, dan Taiwan. Adanya Twitter sebagai perkembangan kemajuan teknologi informasi juga semakin memperluas partisipasi masyarakat secara global untuk menanggapi isu-isu tersebut dengan cuitan Twitter. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana MTA bisa mempengaruhi bahwa terdapat aktivisme transnasional baru dalam MTA, yaitu adanya peran globalisasi dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi perkembangan gerakan MTA di Hong Kong, Thailand, dan Taiwan.

KERANGKA BERPIKIR

Dalam bukunya *The New Transnational Activism*, Sidney Tarrow berpendapat bahwa aktivisme transnasional adalah gerakan transformatif. Transformasi ini dapat menjadi engsel antara dunia bangsa-bangsa dan dunia di mana identitas nasional hanyalah salah satu dari banyak identitas: lokal, nasional, dan transnasional. Tarrow berpendapat bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan transnasional terikat dan didukung oleh jaringan domestik; dalam mengambil langkah ini, mereka mengaktifkan proses transisi antara politik nasional dan internasional; ketika mereka kembali ke rumah, mereka membawa bentuk tindakan baru, kerangka kerja baru untuk masalah domestik, dan mungkin identitas baru yang suatu hari nanti bisa menggabungkan perselisihan domestik dan internasional. Aktivisme transnasional juga memiliki sejarah; itu bukan hanya reaksi terhadap globalisasi; itu dibentuk oleh perubahan struktur peluang politik internasional. Tarrow berpendapat bahwa globalisasi memberikan insentif dan tema untuk aktivisme transnasional,

internasionalismelah yang menawarkan kerangka kerja, seperangkat titik fokus, dan struktur peluang bagi aktivis transnasional. Ia beroperasi melalui dua mekanisme yang sudah dikenal, difusi dan mobilisasi dari atas, dan ia menampakkan dirinya melalui adopsi yang luas dari bentuk-bentuk aksi kolektif yang serupa.(Tarrow, 2005)

Mobilisasi internasional adalah mekanisme klasik untuk aksi kolektif transnasional. Gerakan untuk menjadikan 1 Mei sebagai hari libur pekerja internasional menyebar dari AS ke Eropa melalui gerakan 8 jam sehari dari Sosialis Internasional. Esperanto adalah gerakan untuk menciptakan bahasa internasional yang disebar oleh International Esperanto Association. Setelah Perang Kemerdekaan Italia, Henry Dunant mendirikan Palang Merah Internasional dan mendirikan cabang di seluruh dunia. Melalui "Blackjack" Lenin, Komintern menyatukan gerakan internasional dari pusatnya di Moskow. Proses ini berlanjut ketika Islam politik menyebar dari Timur Tengah ke Eropa dan Asia.

Ada varian baru aktivisme transnasional, yaitu aktivisme transnasional baru yang muncul di era globalisasi. Aktivisme transnasional baru terkait dengan gelombang globalisasi saat ini. Gelombang globalisasi ini juga dibersamai dengan perubahan struktur politik internasional, yang melibatkan masyarakat dan elit yang lebih luas, dan meluas ke isu domestik dan internasional yang lebih luas. Komunikasi elektronik yang cepat, perjalanan internasional yang murah, penyebaran bahasa Inggris, dan penyebaran "naskah" modernitas telah mendorong aktivisme transnasional dalam beberapa dekade terakhir. Banyak pengamat menambahkan klaim kelima yang lebih umum: bahwa globalisasi bertanggung jawab atas munculnya aktivisme transnasional.(Donatella Della Porta, 2005; Masters, 2010; Tarrow, 2005)

Dampak globalisasi terhadap aktivisme transnasional dapat dilihat pada integrasi ekonomi dunia pada pertengahan tahun 1990-an. Sejumlah perubahan terkait telah secara kolektif memperluas dan meningkatkan cakupannya. *Pertama*, legitimasi ekonomi neoliberalisme, yang secara kolektif dikenal sebagai "Washington Concensus," mulai berbuah pahit dalam

runtuhnya macan Asia dan melebarnya ketimpangan antara Utara dan Selatan. *Kedua*, lembaga-lembaga internasional yang melanggengkan neoliberalisme, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, dan sampai batas tertentu Uni Eropa, telah mengambil peran yang lebih sentral sebagai sasaran perlawanan. *Ketiga*, dinamika globalisasi telah memunculkan kampanye lintas batas dan gerakan organisasi seperti *People's Global Action* dan ATTAC (*Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens*). *Keempat*, teknologi elektronik baru dan akses yang lebih luas ke teknologi tersebut telah meningkatkan kemampuan kami untuk mengatur kampanye olahraga secara cepat dan efektif di banyak lokasi secara bersamaan. (Tarrow, 2005)

Sementara globalisasi merupakan sumber advokasi dan kerangka kerja untuk mobilisasi, internasionalisme adalah yang memandu perlawanan terhadap globalisasi, menyediakan titik fokus perlawanan, dan memberikan peluang bagi pembentukan koalisi dan gerakan transnasional. Jika globalisasi mencakup perdagangan lintas batas, keuangan, dan mobilitas manusia yang terus meningkat, maka internasionalisme menyediakan struktur peluang di mana aktivisme transnasional dapat muncul. Seiring dengan meningkatnya internasionalisasi, dapat diharapkan membawa ancaman baru dan peluang baru untuk aktivisme. Melalui fokus bersama pada proses aktivisme transnasional, Tarrow berusaha untuk menunjukkan bahwa aktivisme transnasional baru melampaui persamaan yang semakin global, resistensi yang lebih besar yang mendefinisikan konteks kelembagaan dan politik di mana kelas aktivisme transnasional baru berkembang sehingga membuat para aktivis ini bergerak di antara akar lokal dan politik internasional, dan kemudian memutar mereka kembali ke politik domestik.

Sydney Tarrow juga memberikan contoh tentang internasionalisme dan opini. Pada tanggal 15 Februari 2003, 2,5 juta orang Italia berbaris melalui stadion untuk memprotes perang yang akan datang di Irak. Spanduk yang mereka lambaikan dan topeng kematian yang dikenakan beberapa orang melambangkan kemarahan mereka pada agresi Amerika dan ketidakpedulian

terhadap hukum internasional. Tetapi mereka juga memprotes dukungan pemerintah mereka untuk perang dan mendukung berbagai tuntutan domestik, dari reformasi pensiun hingga pengangguran hingga masalah hukum Perdana Menteri Berlusconi. Bangsa Romawi tidak sendirian. Pada hari yang sama di Paris, 250.000 berbaris menentang perang; di Berlin, 500.000 berbaris melalui Gerbang Brandenburg; di Madrid, 1 juta pengunjung rasa; di Barcelona, 1,3 juta; di London, 1,75 juta -- demonstrasi terbesar di sejarah kota -- di Hyde Park, memprotes perang dan dukungan Perdana Menteri Blair untuk perang. Bahkan di New York, dalam menghadapi perlakuan kasar pasca 9/11 dari NYPD, lebih dari 500.000 orang berkumpul di sisi timur Manhattan.(Tarrow, 2005)

Pada hari itu di bulan Februari, berkeliling dunia dengan matahari dari Selandia Baru dan Australia, diperkirakan 16 juta orang berbaris, berdemonstrasi, menyanyikan lagu-lagu damai dan kadang-kadang bentrok dengan polisi. Ini mungkin demonstrasi internasional terbesar dalam sejarah. Demonstrasi 15 Februari memberi kami kesempatan untuk memeriksa dampak internasionalisme pada politik kontroversial. Mereka menggambarkan banyak proses yang saya pelajari dalam buku ini. 15 Februari juga melambangkan beberapa isu kunci dalam konflik transnasional: pergeseran frustrasi aktivis dari keadilan global ke protes damai internasional; sulitnya mempertahankan aksi kolektif transnasional setelah titik kontak sementara ditinggalkan; kompleksitas membentuk aliansi berkelanjutan antara orang-orang di negara lain.(Tarrow, 2005)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian ilmiah, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian, maka dapat mempermudah suatu penelitian ilmiah mencapai tujuan. Metode dalam sebuah penelitian ilmiah merupakan proses yang berguna bagi penulis untuk lebih memahami objek dari penelitian yang sedang dilakukan guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian merupakan upaya yang dilakukan penulis

untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan sebuah metode tertentu secara sistematis, dan lengkap. Oleh sebab itu, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan umum suatu penelitian adalah untuk mengungkap suatu masalah, maka dari itu langkah-langkah yang digunakan harus relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan.(Sugiyono, 2013)

Metode penelitian adalah suatu metode untuk meneliti suatu objek, suatu sistem pemikiran, suatu kondisi, suatu kelas peristiwa, ataupun status kelompok manusia pada masa ini. Tujuan dari penelitian model deskriptif adalah untuk membuat gambaran, deskripsi, atau lukisan secara faktual, sistematis, dan akurat yang didalamnya terdapat sifat-sifat, fakta-fakta, dan hubungan yang terjadi antara fenomena yang sedang diteliti.(Sugiyono, 2013) Adapun metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Menurut John W. Creswell, studi kasus adalah eksplorasi "suatu sistem yang terikat" atau "suatu kasus/banyak kasus" yang tunduk pada pengumpulan data yang mendalam dari waktu ke waktu dan melibatkan berbagai informasi "kaya" dalam suatu sumber kasus. Sistem yang mengikat ini terikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dipelajari dari program, peristiwa, kegiatan, atau individu. Studi kasus adalah studi di mana seorang peneliti mengeksplorasi suatu fenomena (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, peristiwa, proses, lembaga, atau kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi rinci dan mendalam dalam rentang tertentu dengan menggunakan berbagai pengumpulan data prosedur.(Wahyuningsih, 2013)

Dalam penelitian ini, penulis berupaya menjelaskan isu yang sedang diteliti dengan analisa yang didukung oleh data serta fakta yang relevan. Pengumpulan data penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder. Data-data yang akan diambil adalah data mengenai perkembangan gerakan *Milk Tea Alliance* di Hong Kong, Thailand, dan Taiwan. Data-data tersebut dapat berupa cuitan populer di Twitter, berita, dan *statement* dari pejabat elit politik dan aktivis.

PEMBAHASAN

Awal Mula Gerakan *Milk Tea Alliance*

Milk Tea Alliance (selanjutnya disebut MTA) merupakan sebuah jaringan luas yang berisi kumpulan pemrotes, aktivis, dan anak muda dari seluruh Asia yang bersifat *leaderless*, tidak terkoordinir oleh suatu badan ataupun komunitas tertentu dalam bentuk apapun. Bagi aktivis yang tinggal di Taiwan dan Hongkong, terdapat dua nilai sentral yang tidak dapat dipisahkan, yakni pro-demokrasi dan anti-Beijing. MTA adalah MTA adalah sebuah gerakan media sosial dengan menggunakan tagar *#MilkTeaAlliance* di Twitter yang mengkritisi isu-isu sosial dan politik di sejumlah negara, antara lain isu pro-demokrasi. (Dewi & Rahmah, 2020) Aktivitas yang menggunakan tagar *Milk Tea Alliance* digunakan untuk mengkritisi isu-isu politik di negara-negara Asia, misalnya isu demokrasi di Hong Kong, pertentangan monarki di Thailand, dan juga dalam merespons kudeta militer di Myanmar. Gerakan ini memiliki satu cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan demokrasi. (Laignee Barron, 2021)

Gerakan ini menyebar secara daring diawali oleh sebuah meme dan bukan merupakan gerakan yang turun ke jalan. Gerakan ini awalnya dilihat sebagai tanggapan atas meningkatnya nasionalisme Tiongkok di kawasan itu, baik secara luring maupun daring. Sebagai bagian dari bentuk protes mereka terhadap isu demokrasi yang sedang berlangsung, aktivis di Taiwan, Thailand, India, Hong Kong, dan Myanmar mulai menggunakan citra dan slogan yang sama. Lama kelamaan gerakan ini dianggap sebagai gerakan pro-demokrasi dan anti otoriter yang lebih luas. Nama *Milk Tea* dalam MTA dilatarbelakangi oleh kesamaan dari tiga negara yang mengawali gerakan ini, yaitu Thailand, Taiwan, dan Hong Kong yang sama-sama memiliki minuman populer yang sama, yaitu teh susu. Sedangkan, Cina sebagai target utama gerakan ini tidak umum meminum teh susu. Lambat laun teh susu menjadi simbol solidaritas anti-Cina atau pro-demokrasi. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2021, gerakan daring ini telah menyebar secara luring dan telah menjadi gerakan yang bersifat multi-nasional yang berisi protes tanpa diakomodir. Walaupun tidak

terakomodir, tujuan para aktivis MTA selalu sama: memperkuat nilai-nilai demokrasi di wilayah yang mulai krisis demokrasi.(Solace Global, 2021)

Gambar 1. Tweet yang pernah disukai oleh Bright. Pada tweet ini disebutkan bahwa Hong Kong adalah negara yang terpisah dengan RRC.



Sumber: Twitter

Tagar MTA muncul awalnya karena sebuah kesalahpahaman. Pada *The Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement* yang berlangsung di Hong Kong pada kurun waktu 2019-2020, sebuah cuitan twitter yang menyebutkan empat kota sebagai "negara", termasuk Hong Kong menjadi ramai diperbincangkan setelah seorang aktor Thailand Vachirawit "Bright" Chivaaree, yang sangat populer di China menyukai tweet tersebut. Tweet tersebut dibuat oleh akun fotografer Thailand @Yamastdio. Tweet yang dibuat oleh akun @Yamastdio tersebut menjadi ramai lantaran sampai saat ini Hong Kong merupakan wilayah semi-otonom yang berada di bawah kedaulatan Tiongkok dan tidak independen atau berdaulat sebagai "negara" seperti tweet yang diunggah oleh akun @Yamastdio. Hal ini mengundang respon kemarahan netizen Hong Kong dan sontak ia diserang di Twitter.(Schaffar &

Wongratanawin, 2021) Bright lalu meminta maaf dengan menuliskan *tweet* berikut.

Gambar 2. Pernyataan Maaf Bright Melalui Twitter



Sumber: Twitter @bbrightvc

Mereka juga mulai menargetkan pacar Bright, selebriti Thailand Weeraya Sukaram, yang diyakini oleh para pendukung PKC juga telah menghina China, dan khususnya wanita China, dalam postingan Instagram yang sekarang telah dihapus beberapa tahun sebelumnya. Pada 15 September 2017, Bright berkomentar di Instagram bahwa New terlihat secantik "gadis Cina", yang dibalas oleh New dengan koreksi: Dia cantik seperti "wanita Taiwan." Nasionalis Cina juga menuduh New me-retweet sebuah tweet yang mempertanyakan apakah COVID-19 berasal dari laboratorium China, yang dikenal sebagai teori kebocoran lab, tetapi retweet ini telah dihapus dari feed Twitter-nya. (Jazilah Salam, 2022) Pengguna pro-PKC pada tahun 2020 mulai menuntut agar dia meminta maaf, menjebak akun media sosialnya, dan menghina pengguna media sosial Thailand menggunakan media apapun (gambar, slogan, dll.) yang di-posting ulang secara luas, seringkali dengan pengulangan baru dan bercanda untuk mengolok-olok raja Thailand dan kebijakan pemerintah dengan tagar #nnevy. (Lauren Teixeira, 2020)

Pergeseran makna mulai terjadi ketika troll Cina malah memusatkan kritik balasan mereka kepada pemerintah Thailand. Mereka mengkritik dalam hal ekonomi, pemerintahan, dan monarki Thailand. Secara antusias, pengguna muda media sosial Thailand malah menyukainya. Netizen Thailand mengklaim kembali tagar #nnevy dan menggunakannya untuk "mencelupkan"

pendukung PKC dengan menyanyikan humor yang mencela diri sendiri tentang negara mereka sendiri. Segera setelah itu, pengguna Twitter lainnya, terutama dari Hong Kong dan Taiwan, bergabung dengan kampanye kontra-PKC ini. Pada 11 April 2020, blogger Taiwan Emmy Hu memposting dalam bahasa Mandarin kepada 100.000 lebih pengikutnya di Facebook bahwa netizen Thailand memerangi pendukung PKC secara online, untuk mendukung kemerdekaan Taiwan dan otonomi Hong Kong.(Jazilah Salam, 2022)

Pada 13 April 2020, penggunaan pertama #MilkTeaAlliance muncul di Twitter, sering kali bersamaan dengan tagar #nnevy. Salah satu tweet pertama yang mencapai daya tarik (lebih dari 400 retweet) segera menghubungkan beberapa negara Asia yang menunjukkan peta berbagai teh susu di wilayah yang mengelilingi China dan seruan untuk “membentuk #MilkTeaAlliance”.

Gambar 3. Kemunculan Tagar MTA pertama di Twitter



Sumber: Twitter @wenliunyc

Sejak saat itu, banyak poster #nnevy menyebut koalisi mereka sebagai “Aliansi Teh Susu” di Facebook dan Twitter. 15 April 2020, juga merupakan tanggal munculnya tagar #MilkTeaAlliance di media berbahasa Inggris untuk pertama kalinya, dalam sebuah artikel oleh Reuters.(Patpicha Tanakasempipat, 2020)

Gambar 4. Tweet MTA pertama di media berbahasa Inggris



Sumber: Reuters

Perjuangan politik di beberapa negara yang menyerukan tagar #MilkTeaAlliance tersebut memiliki perbedaan pola dan corak, sesuai dengan karakter cara penyajian teh susunya. Misalnya di Thailand, mahasiswa turun ke jalan memiliki poin tuntutan pemilihan baru di bawah konstitusi baru dan meminta untuk membatasi kuatnya hak prerogatif monarki. Adapun di Hong Kong, pengunjung rasa menilai Beijing terus melanggar batas sehingga mereka takut kehilangan kebebasan politik kota mereka. Lain lagi di Taiwan, di mana para aktivis khawatir atas PKC yang berkeinginan untuk menyatukan kembali pulau itu dengan paksa jika perlu. Namun, terdapat satu kesamaan dari ketiga negara tersebut: mereka memperjuangkan penghapusan kediktatoran yang sangat bertentangan dengan demokrasi. Dikutip dari TIME, Tattep "Ford" Ruangprapaikitsere, salah satu aktivis Thailand memberikan pernyataan "Hal ini semakin membuktikan bahwa demokrasi adalah nilai universal, di mana ia menjadi satu-satunya bentuk pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mewujudkan impiannya." (Laignee Barron, 2021) Hong Kong, Thailand, dan Taiwan terikat secara nilai demokrasi dengan meletakkan teh susu sebagai simbol pengikatnya.

Perkembangan *Milk Tea Alliance* di Hong Kong

Dilema mendasar dari pendekatan "satu negara, dua sistem" yang ingin diterapkan Cina ke Taiwan ditunjukkan dalam kedua gerakan masyarakat di Hong Kong, yaitu gerakan Payung pada tahun 2014 dan protes pro-demokrasi pada tahun 2019. Pendekatan keras China dalam menerapkan kerangka kerja

ini telah mengakibatkan terkikisnya perbedaan yang berarti antara kedua sistem tersebut dan menggantikan apa yang dinikmati rakyat Hong Kong dengan pengetatan dan kontrol otoriter. Cina memiliki keputusan akhir atas otonomi Hong Kong yang membatasi ruang keberadaan dua sistem dan supremasi hukum Hong Kong. Hal ini terlihat dari penolakan Cina terhadap hak pilih universal dan dukungan untuk RUU ekstradisi.

Berdasarkan Hukum Dasar Hong Kong, penduduk Hong Kong nantinya harus dapat memilih kepala eksekutif melalui sistem demokrasi "hak pilih universal." (*Article 45, Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China*, n.d.) Namun, ketika masyarakat Hong Kong mulai merasakan bahwa campur tangan Cina mengikis otonomi mereka, ketegangan meningkat pesat di Hong Kong. Contohnya, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala eksekutif 2017, Cina mengharuskan semua kandidat harus "patriotik." (Chu, 2018) Penyaringan kandidat ini dipandang berseberangan dengan Undang-Undang Dasar Hong Kong dan menolak aspirasi rakyat dalam melaksanakan pemilihan yang adil. Protes politik akhirnya bermunculan sebagai ekspresi dari frustrasinya masyarakat sebab tidak diakui sebagai entitas yang benar-benar otonom dan penolakan China terhadap aturan hukum. Karena Cina tidak menunjukkan tanda-tanda mundur ke oposisi terhadap reformasi pemilu saat itu, masyarakat Hong Kong bereaksi dengan melakukan Gerakan Payung 2014.

Gerakan Payung 2014 di Hongkong mengusung perdamaian dengan slogan yang paling menonjol *Occupy Central with Love and Peace*. (Jonathan Kaiman, 2014) Walaupun begitu, aparat keamanan Hong Kong tetap bereaksi keras terhadap gerakan ini. Polisi Hong Kong menarik banyak perhatian media dan menimbulkan perdebatan sengit. Walaupun para aktivis datang dengan pesan damai, polisi tetap menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa serta meminta bantuan triad gangster melawan demonstran. (Jonathan Kaiman, 2014) Hal ini menjadi semakin menambah kecemasan eksistensial bagi Hong Kong, terutama sejak Cina menyerap kembali wilayah Hong Kong yang menjadikan munculnya identitas Hong Kong yang berbeda sebagai kekuatan

pendorong gerakan sosial ini.(Nachman, 2019) Sejak tahun 2000, perjuangan Hong Kong untuk otonomi dan Demokrasi telah berlangsung namun hingga saat ini dengan berbagai gejolak yang terjadi semakin membuktikan bahwa dilema politik tidak mungkin segera terselesaikan. Hal ini disadari oleh para aktivis, terbukti dengan salah satu pernyataannya yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: "Tidak mungkin para pemimpin China akan menanggapi tuntutan kami. Kami tidak akan menyerah, dan kami akan terus berjuang."(Benjamin Garvey, 2014)

Tahun 2019, masyarakat Hong Kong melakukan aksi protes pro-demokrasi untuk menentang undang-undang yang diusulkan yang akan memungkinkan pejabat pemerintah di wilayah administrasi khusus untuk mengekstradisi tersangka kriminal ke daratan Cina. Dengan tetap menonjolkan kolaborasi antara masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa, protes 2019–20 menampilkan protes yang lebih dinamis. Dengan memanfaatkan teknologi, gaya gerilya yang membuat pasukan keamanan terus melebar dan tidak. Pengunjuk rasa memanfaatkan aplikasi smartphone seperti Telegram dan HKmap.live sebagai upaya untuk berkumpul dengan sedikit peringatan dan untuk berpindah antar lokasi sebelum penempatan polisi. Sebagai upaya waspada atas respon lambat pejabat Hong Kong terhadap protes yang terjadi, pihak berwenang di Beijing bersiaga selama lebih dari setahun.(*"Asia's New Generation of pro-Democracy Protesters,"* 2021)

Tren tagar MTA menjadi marak di Twitter pada Juni 2020, ketika Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong disahkan oleh Beijing. Pengesahan Undang-undang tersebut memicu kontroversi dan menciptakan efek mengerikan pada kebebasan berbicara dan gerakan pulau untuk otonomi, mengkriminalisasi kegiatan yang dilihat PKC sebagai "subversi", "pemisahan diri", dan "terorisme." Hal ini juga memungkinkan beberapa orang yang ditangkap di Hong Kong untuk diadili di Daratan China. Undang-undang keamanan telah digunakan terhadap kandidat politik pro-demokrasi di Hong Kong menuai kecaman dari berbagai pihak mulai dari Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch dan utamanya para aktivis pro-

demokrasi di Hong Kong.(Human Rights Watch, 2020) Dalam kasus Hong Kong, MTA bergerak dengan mengangkat isu yang dianggap mengancam demokrasi di Hong Kong, yaitu Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Isu ini diangkat ke permukaan Twitter dan menjadi ramai digunakan untuk mengkritisi apa yang sedang terjadi.

Gerakan protes akhirnya direspon oleh Cina dalam beberapa minggu setelah persetujuan undang-undang keamanan nasional pada 30 Juni 2020 dengan mengizinkan pihak berwenang di Hong Kong untuk memenjarakan penduduk atas tuduhan pemisahan diri, subversi dan kolusi dengan agen asing. Alih-alih menggunakan kekuatan militer langsung, China menggunakan kepolisian represif, pengadilan dan sensor online. Secara bersama-sama, tindakan ini secara efektif mengakhiri pengaturan 'satu negara, dua sistem' untuk Hong Kong yang telah ada sejak 1997.(Human Rights Watch, 2020)

Pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang baru membawa kekhawatiran bagi para pengunjuk rasa, akibatnya banyak pengunjuk rasa yang memilih pindah ke Taiwan untuk melarikan diri. Para pengunjuk rasa muda mulai melarikan diri ke Taiwan pada Juli tahun lalu setelah penyerbuan gedung Dewan Legislatif dan mengintensifkan tindakan keras oleh polisi. Karena tidak ada cara untuk tinggal secara permanen, banyak yang kembali, tetapi para aktivis memperkirakan setidaknya 200 pengunjuk rasa masih berada di Taiwan. Pihak berwenang diam-diam mengizinkan mereka untuk tinggal dalam jangka pendek dengan memperpanjang visa turis dan mendorong mereka untuk mendaftar di program universitas untuk mendapatkan visa pelajar. Beberapa pengunjuk rasa dan warga Hongkong lainnya membantu mengirim masker, helm, dan perlengkapan lainnya ke pengunjuk rasa di rumah. Hingga pada tahun 2020, Taiwan mengeluarkan total 10.813 izin tinggal kepada orang-orang dari Hong Kong, hampir dua kali lipat dari jumlah yang dikeluarkan tahun sebelumnya.(Louise Watt in Taipei, 2020)

Perkembangan *Milk Tea Alliance* di Thailand

Ada dua peristiwa yang memicu terjadinya protes massal di Thailand pada tahun 2020. *Pertama*, terjadinya pembubaran Partai *Future Forward* (FFP) yang memicu protes di lebih dari 50 universitas dan sekolah menengah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, partai yang dipimpin oleh Thanathorn Juangroongruangkit ini merupakan representasi dari kubu anti-kemapanan yang dianggap lebih vokal dari partai Thai Rak Thai (TRT) dalam agenda demokrasi. Partai ini menarik 6,3 juta dari kemungkinan 53 juta suara dalam pemilihan Maret 2019. Khawatir hal itu akan mengancam status quo, pemerintah memutuskan bahwa FFP harus dibubarkan. Pada Februari 2020, Mahkamah Konstitusi membubarkan partai karena alasan yang tidak jelas. (Amy Gunia, 2020) *Kedua*, pada Juli 2020, seorang aktivis HAM Thailand bernama Wanchalearm Satsaksit hilang. Kampanye media sosial menyerukan #saveWanchalerm dan #abolishArticle112 mulai tersebar. Kampanye tersebut juga menyebabkan terjadinya pertemuan-pertemuan kecil yang lama kelamaan meningkat menjadi gerakan politik yang lebih besar yang menuntut pemerintah dan pihak berwenang berhenti melecehkan warga, ditambah amandemen konstitusi saat ini dan reformasi monarki. (New Naratif, 2021)

Masyarakat Thailand sudah lama menyampaikan protes untuk pemerintah monarki. Pada 18 Juli 2020, tagar MTA menemukan penggunaan saat mahasiswa universitas di Bangkok melanjutkan demonstrasi dengan tuntutan menuntut "pembubaran pemerintah, konstitusi baru, dan diakhirinya ancaman terhadap warga negara." Di akhir Juli 2020, *Taiwan Alliance for Thai Democracy* (TATD) didirikan sebagai bentuk solidaritas dukungan masyarakat Taiwan terhadap perwujudan ide-ide demokrasi Thailand. Dua mahasiswa pascasarjana Thailand di Bangkok mengorganisir protes saudara dengan sekitar tiga puluh demonstran Thailand dan Taiwan di depan kedutaan Thailand di Taipei dalam solidaritas dengan mahasiswa di Bangkok pada 2 Agustus 2020. (Dedman & Lai, 2021) Pada 16 Agustus, TATD mengorganisir protes kedua di Stasiun Utama Taipei, memobilisasi ratusan demonstran. Untuk mempromosikan kehadiran dan menyebarkan kesadaran akan protes, TATD menggunakan tagar berbahasa Thailand #ไทเปจะไมห (#TaipeiHasHadEnough)

dan #MilkTeaAlliance di halaman Facebook-nya (@tatdnow) dan di Twitter.(Dedman & Lai, 2021)

Aksi protes yang dilakukan TATD ramai diliput media internasional dan domestik, termasuk dengan tagar MTA yang kian masif digunakan tak luput menjadi bahan diskusi. Media internasional Reuters mewawancarai mahasiswa Thailand Akrawat Siripattanachok pada 18 Agustus 2020. Akrawat mengatakan, "Ini adalah ekspresi fisik pertama dari *Milk Tea Alliance*. Kami tidak ingin hanya membicarakannya secara online. Kami menginginkan aliansi pan-Asia untuk demokrasi."(Patpicha Tanakasempipat & Yanni Chow, 2020)

Tagar MTA juga didiskusikan oleh Pavin Chachavalpongpon melalui wawancara yang dimuat di Jurnal Austrian Journal of South-East Asian Studies. Berikut kutipannya:

"*Milk Tea Alliance* secara efektif menggeser debat online mengenai rintangan kritis terhadap demokratisasi menuju aktivisme jalanan dan gerakan politik, yang dipimpin oleh suara-suara netizen muda. Pengaruh internasional dari aliansi online dengan menunjukkan bahwa demonstran pro-demokrasi sejauh Belarus telah terinspirasi oleh *Milk Tea Alliance* dalam "perjuangan mereka melawan pemerintah Alexander Lukashenko."(Schaffar, 2021)

Selain itu, MTA telah menjadi saluran internasional untuk berbagi taktik online yang dapat digunakan anggota di rumah dalam protes offline mereka untuk demokrasi. Kiat yang dibagikan melalui MTA, terutama dari anggota yang berbasis di Hong Kong, berkisar dari cara untuk tetap aman dari polisi di barikade hingga cara memadamkan tabung gas air mata polisi. Demonstran Thailand dalam gelombang protes mahasiswa pro-demokrasi 2020 di negara itu dan demonstran anti-kudeta Myanmar sama-sama mengadopsi taktik "menjadi air" Hong Kong: mereka melakukan protes cepat dan lancar yang dibongkar sebelum polisi dapat mengkoordinasikan tindakan yang tepat. Mereka juga memiliki "garis depan" – sukarelawan yang memilih untuk menjadi yang paling dekat dengan polisi sehingga apabila terjadi bentrokan, dengan segera orang-orang dapat mengamankan diri ketempat yang dirasa aman.(Jessie Lau, 2021)

Perkembangan *Milk Tea Alliance* di Taiwan

Penggunaan tagar MTA di Taiwan bermula saat Cina mengeluarkan diktat untuk publikasi India tentang cara melaporkan dengan benar Hari Nasional Taiwan pada Oktober 2020. Mengutip dari Taiwan News, Kedutaan Besar RRC di New Delhi menyurati media India dengan narasi berikut:

“Mengenai apa yang disebut 'Hari Nasional Taiwan' yang akan datang, Kedutaan Besar Cina di India ingin mengingatkan teman-teman media kami bahwa hanya ada satu Cina di dunia, dengan Pemerintah Republik Rakyat Cina sebagai pemerintah yang sah, termasuk Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Cina.”(Eric Chang, 2020)

Sebagai tanggapan, MTA membagikan meme yang menggambarkan presiden Taiwan Tsai Ing-Wen dan dan Perdana Menteri India Narendra Modi saling bersulang dengan teh susu dan masala chai (teh susu berbumbu India). Itu dibagikan di media sosial dengan tagar *#TweetForTaiwan* dan *#TaiwanIndiaBhaiBhai* yang apabila diterjemahkan memiliki maksud *#TaiwanIndiaBrotherBrother*.(Jazilah Salam, 2022)

Gambar 5. *Meme* Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen dan dan Presiden India Perdana Menteri Narendra Modi



Sumber: @digidiploTaiwan

Poster ucapan selamat kepada Taiwan pada Hari Nasional ke-109, yang dirayakan pada 10 Oktober 2020, dipasang di dekat kedutaan besar Cina di New Delhi.(Jassie Hsi Cheng, 2020) Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te memposting *tweet* di hari yang sama. *"Proud to see our flag fly high and be*

recognized all over the world. We thank the people from so many countries who today expressed congratulations and support. Especially our Indian friends. Namaste! #TaiwanNationalDay #JaiHind #MilkTeaAlliance"

Gambar 6. Tweet Lai Ching-te



Sumber: Twiter @ChingteaLai

Dalam *tweet* tersebut, dapat dilihat bahwa Wakil Presiden Taiwan menggunakan tagar MTA dalam ucapan Hari Nasional Taiwan di akun pribadinya. Sontak penggunaan tagar ini menuai respon dan persepsi dukungan atas MTA. Salah satu respon diberikan oleh Hsiao Bi-khim, Perwakilan ROC untuk Amerika Serikat, *"Wow! What a #MilkTeaAlliance"*.

Gambar 7. Tweet Hsiao Bi-khim



Sumber: Twitter

Pada peringatan Hindu Diwali pada 14 November 2020, Joshua Wong seorang aktivis *Milk Tea Alliance* dari Hong Kong memberikan ucapan kepada masyarakat India sebagai bentuk balasan atas ucapan India terhadap Hari Nasional Taiwan, *"#दीपावली_की_हार्दिक_शुभकामनाएं #दीपावली #HappyDiwali to all*

of our #MilkTeaAlliance friends in India. Hong Kong and India had both faced threats posed by the pandemic and CCP while the friendship between us had been strengthened in this challenging 2020."

Gambar 8. Tweet Joshua Wong



Sumber: @joshuawongcf

Dalam kasus Taiwan, MTA bergerak sebagai dukungan oleh para aktivis dan juga para pejabat atas "kemerdekaan" yang diinginkan oleh Taiwan. Terlihat dari penggunaan tagar pada cuitan yang dibuat oleh Wakil Presiden Taiwan dan respon Hsiao Bi-khim serta ucapan yang diberikan aktivis Joshua Wong. Ramainya penggunaan tagar ini di Twitter menunjukkan pembuktian teori aktivisme transnasional baru yang menyatakan bahwa gelombang globalisasi ada hubungannya dengan aktivisme transnasional. Globalisasi memicu penyebaran kesadaran masyarakat global akan keinginan Taiwan untuk diakui sebagai sebuah entitas tersendiri di luar Cina. Disertai dengan perkembangan teknologi, para pengguna Twitter termasuk di dalamnya para pejabat dan aktivis mengekspresikan dukungannya melalui tagar MTA. MTA juga membuat adanya perubahan struktur politik internasional dalam isu demokrasi ini yang melibatkan para pejabat elit dan orang-orang biasa sehingga masalah ini menjangkau isu-isu domestik dan internasional, terlihat dengan keterlibatan Wakil Presiden Taiwan, Perwakilan ROC untuk Amerika Serikat, dan aktivis Joshua Wong.

KESIMPULAN

Globalisasi bertanggung jawab atas munculnya aktivisme transnasional baru. Hal ini dapat kita lihat pada perkembangan MTA di Hong Kong, Thailand, dan Taiwan. MTA bergerak di tiga negara tersebut dengan mengikutsertakan

peran teknologi untuk menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan isu demokrasi. Tagar MTA bergerak untuk menyatukan opini-opini dan menggerakkan mereka untuk melakukan aksi kolektif, baik secara online maupun offline. Dalam penyebaran MTA di Hong Kong, isu domestik yang diangkat adalah isu pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Isu ini mencuat di permukaan Twitter dan tagar MTA menjadikan masyarakat global melawannya. Dalam penyebaran MTA di Thailand, isu domestik yang diangkat adalah pembubaran partai dan hilangnya seorang aktivis HAM. Hal ini memicu mobilisasi massa internasional dengan saling berbagi taktik melalui tagar MTA. Massa lokal juga termobilisasi dengan adanya Taiwan Alliance for Thai Democracy (TATD) yang mengorganisir serangkaian aksi protes yang merupakan ekspresi fisik dari MTA. Dalam perkembangannya di Taiwan, MTA membawa isu lokal keinginan Taiwan merdeka sebagai entitas di luar Cina yang diekspresikan melalui cuitan para pejabat dan aktivis. MTA membuat adanya perubahan struktur politik internasional dalam isu demokrasi ini yang melibatkan para pejabat elit dan orang-orang biasa sehingga masalah ini menjangkau isu-isu domestik dan internasional, terlihat dengan keterlibatan Wakil Presiden Taiwan, Perwakilan ROC untuk Amerika Serikat, dan aktivis Joshua Wong. Sehingga penelitian ini telah menjelaskan bagaimana MTA sebagai gerakan aktivisme transnasional baru bergerak memobilisasi massa dengan adanya keterlibatan globalisasi dan kemajuan teknologi yang merubah struktur politik internasional dan mengikutsertakan peran elit politik dan orang biasa dalam memperluas isu domestik ke permukaan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amy Gunia. (2020, February 21). Thailand's Opposition Future Forward Party Disbanded | Time. Retrieved July 4, 2022, from TIME website: <https://time.com/5788470/thailand-future-forward-party-disbanded/>
- Article 45, Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China.* (n.d.). Retrieved from <https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/chapter4.html>
- Asia's new generation of pro-democracy protesters. (2021). *Strategic Comments*, 27(4), vii–ix. <https://doi.org/10.1080/13567888.2021.1949140>
- Benjamin Garvey. (2014). Hong Kong leader refuses to step down; protestors welcome talks. Retrieved June 8, 2022, from AA website: <https://www.aa.com.tr/en/world/hong-kong-leader-refuses-to-step-down-protestors-welcome-talks/114339>
- Chu, T. C. Y. (2018). Routledge handbook of Democratization in East Asia. In *Routledge Handbooks*. London: Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315756684>
- Dedman, A. K., & Lai, A. (2021). Digitally Dismantling Asian Authoritarianism: Activist Reflections from the #MilkTeaAlliance. *Contention*, 9(1), 97–132. <https://doi.org/10.3167/CONT.2021.090105>
- Dewi, H., & Rahmah, A. (2020). Milk Tea Alliance : Gerakan Solidaritas Pan-Asia. *Research Gate*, (August), 0–9.
- Donatella Della Porta, S. T. (2005). Transnational Protest & Global Activism. In *Rowman & Littlefield Publishers*. United States of America.
- Eric Chang. (2020, October 8). China instructs Indian media how to report on Taiwan's National Day. Retrieved September 15, 2022, from Taiwan News website: <https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4025738>
- Human Rights Watch. (2020, July 29). China: New Hong Kong Law a Roadmap

for Repression. Retrieved September 15, 2022, from Human Rights Watch website: <https://www.hrw.org/news/2020/07/29/china-new-hong-kong-law-roadmap-repression>

Jassie Hsi Cheng. (2020, October). The Taiwan–India ‘Milk Tea Alliance.’ Retrieved September 15, 2022, from The Diplomat website: <https://thediplomat.com/2020/10/the-taiwan-india-milk-tea-alliance/>

Jazilah Salam. (2022, May 25). Milk Tea Alliance: From Meme War to Transnational Activism. Retrieved September 15, 2022, from The Media Manipulation Casebook website: https://mediamanipulation.org/case-studies/milk-tea-alliance-meme-war-transnational-activism#footnote1_q8c36lb

Jessie Lau. (2021, February 13). Myanmar’s Protest Movement Finds Friends in the Milk Tea Alliance. Retrieved September 15, 2022, from The Diplomat website: <https://thediplomat.com/2021/02/myanmars-protest-movement-finds-friends-in-the-milk-tea-alliance/>

Jonathan Kaiman. (2014). Hong Kong’s unofficial pro-democracy referendum irks Beijing | Hong Kong | The Guardian. Retrieved June 8, 2022, from The Guardian website: <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/25/hong-kong-unofficial-pro-democracy-referendum-beijing>

Laignee Barron. (2021). What Is the Milk Tea Alliance? Behind the Democracy Movement | Time. Retrieved April 25, 2022, from Time website: <https://time.com/5904114/milk-tea-alliance/>

Lauren Teixeira. (2020, April 17). Thais Beat China’s Online Warriors. Retrieved September 15, 2022, from Foreign Policy website: <https://foreignpolicy.com/2020/04/17/nnevy-bright-firewall-thailand-china-online-army/>

Louise Watt in Taipei. (2020, June 25). Hong Kong protesters flee to Taiwan to continue China resistance | Taiwan | The Guardian. Retrieved September

15, 2022, from The Guardian website:
<https://www.theguardian.com/world/2020/jun/25/hong-kong-protesters-flee-to-taiwan-to-continue-china-resistance>

Masters, C. (2010). Transnational Activism. In S. Laura (Ed.), *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations* (pp. 318–332). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203864944-33>

Nachman, L. (2019). Challenging Beijing's Mandate of Heaven: Taiwan's Sunflower Movement and Hong Kong's Umbrella Movement. By Ming-sho Ho. Philadelphia: Temple University Press, 2019. xvi, 269 pp. ISBN: 9781439917077 (paper). *The Journal of Asian Studies*, 78(4), 904–905. <https://doi.org/10.1017/S0021911819001359>

New Naratif, P. and V. (2021, June 4). What Happened to Wanchalearm? – New Naratif. Retrieved July 4, 2022, from New Naratif website: <https://newnaratif.com/what-happened-to-wanchalearm/>

Nizmi, Y. E. (2016). Melihat Lebih Dekat Kontribusi Aktivisme Transnasional Terhadap Demokrasi Dalam Studi Hubungan Internasional. *LANTIP Jurnal Ilmu Sosial Dan Ekonomi*, 06(2), 1–23.

Patpicha Tanakasempipat. (2020, April 15). Young Thais join "Milk Tea Alliance" in online backlash that angers Beijing | Reuters. Retrieved September 15, 2022, from Reuters website: <https://www.reuters.com/article/us-thailand-china-internet-idUSKCN21X1ZT>

Patpicha Tanakasempipat, & Yanni Chow. (2020, August 18). Pro-democracy Milk Tea Alliance brews in Asia | Reuters. Retrieved September 15, 2022, from Reuters website: <https://www.reuters.com/article/asia-protests-idUSL4N2FJ12F>

Piper, N., & Uhlin, A. (2004a). *New perspectives on transnational activism*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203563243-5>

Piper, N., & Uhlin, A. (2004b). *New perspectives on transnational activism*.

Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203563243-5>

Schaffar, W. (2021). "I Am not Here for Fun": The Satirical Facebook Group Royalists Marketplace, Queer TikTokking, and the New Democracy Movement in Thailand: An Interview With Pavin Chachavalpongpun. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 14(1), 129–137.

Schaffar, W., & Wongratanawin, P. (2021). The #MilkTeaAlliance: A New Transnational Pro-Democracy Movement Against Chinese-Centered Globalization? *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 5(35), 5–36.

Solace Global. (2021). *The Milk Tea Alliance*. Poole.

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta.

Tarrow, S. (2005). The New Transnational Activism. In *Cambridge University Press*. Cambridge.

Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. In *UTM PRESS Bangkalan - Madura*. Madura: UTM PRESS Bangkalan - Madura.